

**KAJIAN TENTANG
IMPLEMENTASI METODE BHAKTI TNI
DALAM RANGKA TERWUJUDNYA SASARAN BINTER**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

a. TNI AD dalam melaksanakan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan aspek darat dengan melaksanakan fungsi utama pembinaan teritorial yang bertujuan untuk menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini dengan sasaran mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang serta kemandirian TNI-Rakyat¹. Penyelenggaraan pembinaan teritorial oleh TNI AD akan selalu melibatkan berbagai instansi terkait sehingga dalam pengelolaannya memerlukan proses perencanaan dengan memadukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) pertahanan, yang dibahas dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan

¹ Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/98/V/2007, tanggal 16 Mei 2007 tentang Bujukin tentang Binter hal. 7

(Musrenbang) serta pelaksanaannya dalam bentuk Bhakti TNI. Bhakti TNI sebagai salah satu metode Binter merupakan pelibatan TNI dalam membantu penyelenggaraan kegiatan bantuan kemanusiaan untuk menangani masalah-masalah sosial atas permintaan instansi terkait atau inisiatif sendiri yang dikoordinasikan serta berbagai hal yang terkait dengan penyiapan wilayah pertahanan di darat dan kekuatan pendukungnya yang dilaksanakan baik secara berdiri sendiri maupun bersama-sama dengan instansi terkait dan masyarakat lainnya².

b. Penyelenggaraan metode Bhakti TNI sebagai salah satu metode Pembinaan Teritorial (Binter) dalam rangka mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman dan mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai roh kekuatan TNI dalam melaksanakan tugasnya dirasakan masih perlu ditinjau implementasinya, meskipun penyelenggaraan metode Bhakti TNI dengan melaksanakan 9 macam operasi Bhaktinya dinilai sudah dapat membantu kesulitan masyarakat dalam bidang

² Keputusan Danseskoad Nomor Kep 56/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 Naskah Departemen Tentang pengetahuan Binter untuk Dikreg Seskoad hal.15

pembangunan daerah dan sudah mengakomodir kepentingan pertahanan. Dari uraian bahwa penyelenggaraan metode Bhakti TNI sudah dapat mengakomodir kepentingan pertahanan, maka timbul pertanyaan, Apakah Implementasi Metode Bhakti TNI yang selama ini dilaksanakan telah dapat mewujudkan sasaran Binter ?

c. Dengan memahami permasalahan tersebut di atas, maka Seskoad melaksanakan kajian dengan judul **Implementasi metode Bhakti TNI dalam rangka terwujudnya sasaran Binter**. Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagaimana penyelenggaraan metode Bhakti TNI dapat menjadikan wilayah Nusantara sebagai ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh serta dapat terwujudnya kemandirian TNI-Rakyat.

2. **Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Tulisan ini memberikan gambaran tentang bagaimana Implementasi Bhakti TNI dalam rangka terwujudnya sasaran Binter.

b. **Tujuan.** Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi komando atas dalam menentukan kebijakan lebih lanjut tentang bagaimana implementasi metode Bhakti TNI dimasa yang akan datang.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.**

a. **Ruang Lingkup.** Pembahasan tulisan ini dibatasi pada implementasi metode Bhakti TNI dalam rangka mewujudkan wilayah sebagai ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh serta terwujudnya kemanunggalan TNI- Rakyat.

b. **Tata Urut:**

- 1) Pendahuluan.
- 2) Latar Belakang Pemikiran.
- 3) Data dan Fakta.
- 4) Analisa.
- 5) Penutup.

4. **Metode dan Pendekatan.**

a. Metode. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menganalisa data fakta yang ada dihadapkan kepada sasaran Binter.

b. Pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan sebagai data sekunder dan pengalaman tugas dilapangan.

5. **Pengertian.**

a. Binter adalah upaya, pekerjaan dan tindakan baik secara berdiri sendiri maupun bersama dengan aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan aspek darat yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta terwujudnya kemandirian TNI-Rakyat, yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI³.

b. Bhakti TNI adalah pelibatan TNI sebagai alat pertahanan negara dalam menjalankan fungsi sosial untuk menunjang pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah tanpa

³ Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/98/V/2007, tanggal 16 Mei 2007 tentang Bujukin tentang Binter hal. 40

mengabaikan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dibidang pertahanan negara⁴.

c. Operasi Bhakti adalah partisipasi TNI sebagai alat pertahanan negara dalam rangka pembinaan wilayah dibidang fisik materiil dan mental spiritual dilakukan atas perintah Panglima TNI dengan memanfaatkan tenaga, daya, dana dan sarana dalam rangka Bhakti TNI⁵.

d. Karya Bhakti adalah kegiatan satuan atau perorangan dalam penanganan masalah yang bersifat material maupun mental spiritual dilaksanakan secara rutin atau inisiatif sendiri bersama masyarakat dalam rangka dharma Bhakti TNI untuk kepentingan masyarakat umum⁶.

e. Ruang Juang adalah perwujudan wilayah pertahanan yang siap sebagai mandala perang atau mandala operasi yang mendukung bagi kepentingan operasi satuan sendiri dalam memenangkan pertempuran⁷.

⁴Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/480/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004 tentang Bujuknik Gar Bhakti TNI hal. 4

⁵ Ibid hal. 5

⁶ Ibid hal. 5

⁷ Buku Renbinter Pusterad tahun 2006 hal. 2

f. Alat Juang adalah tersedianya komponen cadangan dan pendukung yang sudah terorganisir secara nyata dengan segenap perangkatnya yang siap digunakan sebagai kekuatan pengganda untuk memenangkan pertempuran⁸.

g. Kondisi Juang adalah kondisi dinamis masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertanggung-jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara⁹.

h. Kemanunggalan TNI-Rakyat adalah kondisi kejiwaan dimana rakyat telah merasa bersama, senasib seperjuangan dengan TNI dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁰.

i. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) adalah hasil pemanfaatan yang diwujudkan dalam struktur dan pola perencanaan ruang (ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara) sebagai suatu kesatuan wilayah¹¹.

⁸ Ibid hal. 2

⁹ Ibid hal. 2

¹⁰ Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/481/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004 tentang Bujuknik tentang Bintangwil hal. 37

¹¹ PPRI No. 47 tahun 1997 tentang RTRW nasional

BAB II

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

6. **Umum.** Penyelenggaraan Bhakti TNI ini berpedoman pada landasan pemikiran yang meliputi landasan operasional sebagai landasan normatif, sedangkan dasar pemikiran merupakan suatu logika pemikiran bahwa Bhakti TNI merupakan suatu kegiatan dalam rangka untuk mencapai suatu sasaran.

7. **Landasan Pemikiran.**

a. **Landasan Konseptual.**

1) Landasan Visional. Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik dan landasan geostrategi bagi bangsa Indonesia mengandung arti bahwa tanah air Indonesia beserta isinya sebagai satu kesatuan wadah dan sarana perjuangan bangsa secara utuh dan bulat¹². Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, cara pandang terhadap wawasan nusantara memberi pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa.

¹² Buku kewiraan untuk mahasiswa, lemhanas 1981 hal 6

2) Landasan Konsepsional. Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa dan negara menghadapi atau mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara¹³. Ketahanan Nasional memberi arah pembangunan, kesejahteraan dan keamanan di segala aspek kehidupan berbangsa dengan menciptakan kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera adil dan makmur

b. Landasan Operasional.

1) UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU RI No. 34 pasal 7 tahun 2004 tentang TNI dijelaskan bahwa Tugas Pokok TNI dilakukan dengan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dimana salah satu tugas TNI dalam OMSP adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

¹³ Ibid Hal. 78

Dengan demikian Bhakti TNI yang diselenggarakan oleh Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) harus dapat mewujudkan pertahanan negara yang bersifat semesta.

2) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat UUD 1945, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi daerah. Otonomi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Ketentuan undang-undang ini memberi kewenangan kepada Pemda untuk menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan berdasarkan otonomi daerah merupakan salah satu agenda reformasi untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan memerlukan dukungan dan segenap komponen bangsa termasuk Satkowil. Dukungan yang dapat diberikan Satkowil adalah program Bhakti TNI yang diselenggarakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan program pembangunan daerah.

UU ini memuat kewenangan Pemda yang lebih besar daripada pemerintah pusat dalam merencanakan pembangunan di daerah dengan bekerjasama dengan instansi terkait di daerah.

3) UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Haneg) untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bangsa dan negara, Indonesia menganut sistem pertahanan semesta dimana TNI berkedudukan sebagai komponen utama diperkuat oleh masyarakat sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung. Pembangunan daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian maka pertahanan negara akan menjadi tambah kuat.

8. **Dasar Pemikiran.**

a. Melihat kondisi obyektif yang dihadapi bangsa, terutama kondisi yang dihadapi masyarakat pada lapisan rakyat kecil, maka TNI sebagai komponen utama bangsa akan selalu menunjukkan komitmen dan kepedulian sosialnya terhadap kondisi yang dihadapi bangsa dan rakyatnya.

TNI akan tetap melaksanakan dan bahkan mempertajam berbagai bentuk kepedulian sosial yang selama ini telah dijalankan baik pada masa orde baru maupun masa reformasi. Melalui evaluasi dan kajian-kajian, TNI bertekad akan tetap memaksimalkan dan ditingkatkan darma bhaktinya melalui pembangunan. TNI merupakan institusi yang memiliki garis komando jelas, jaringan teritorial dan jalur koordinasi terdekat dengan pemerintah dan elemen masyarakat, harus menempatkan diri menjadi pilar terdepan dan menjadi mitra sipil utama dalam membantu pemerintah dan negara dalam situasi apapun. Kepedulian sosial ini sejalan dengan kondisi dan kenyataan bahwa anggota TNI berasal dari warga negara Indonesia oleh sebab itu disebut sebagai tentara rakyat. Kepedulian sosial kepada rakyat merupakan bentuk bahwa TNI selalu dekat dan bersama sama rakyat dalam kondisi apapun.

b. Satkowil menyelenggarakan Binter dalam rangka membantu pemerintah memberdayakan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan negara. Penyelenggaraan pembinaan teritorial dilaksanakan dengan menggunakan berbagai macam metode untuk mewujudkan sasaran Binter. salah satu metode adalah Bhakti TNI yang kegiatannya melalui

operasi bhakti dan karya bhakti. Operasi bhakti dilaksanakan dengan beberapa macam bentuk operasi yang diselenggarakan berdasarkan perintah dengan memanfaatkan tenaga, dana dan sarana yang dibatasi oleh sasaran, ruang dan waktu, sedangkan kegiatan karya bhakti dilaksanakan atas dasar inisiatif satuan mengacu kepada situasi, kondisi dan kemampuan satuan. Implementasi metode Bhakti TNI yang selama ini berjalan telah memberikan manfaat pada aspek pembangunan dan kepentingan kesejahteraan masyarakat serta memberikan manfaat untuk kepentingan pertahanan, namun belum dapat diukur sampai sejauh mana keberhasilan Bhakti TNI dihadapkan kepada kepentingan pertahanan bila dikaitkan dengan upaya mewujudkan sasaran Binter.

BAB III **DATA DAN FAKTA**

9. **Umum.** Kegiatan Bhakti TNI selama ini menggunakan **tipe** kerjasama dengan pihak lain dan tipe swasembada masing-masing angkatan maupun antar angkatan. Penyelenggaraannya Bhakti TNI diklasifikasikan kedalam dua **bentuk** yaitu berdasarkan pembagian tanggung jawab menyangkut masalah dana, tenaga dan sarana mulai dari skala lokal sampai nasional. Kegiatan Bhakti TNI dilaksanakan melalui operasi bhakti dan karya bhakti, kegiatan operasi Bhakti dibatasi oleh ruang, waktu dan dana berdasarkan perintah operasi, sedangkan karya Bhakti merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan inisiatif para komandan satuan yang bersangkutan sesuai kemampuan satuan yang ada. Untuk dapat memberikan pembuktian secara akademis tentang implementasi Bhakti TNI yang selama ini sudah berjalan namun belum sepenuhnya dapat mewujudkan sasaran Binter, maka dalam kajian ini akan kita lihat data dan fakta yang ada untuk digunakan sebagai langkah awal dalam menganalisa terhadap permasalahan yang mempengaruhi terwujudnya sasaran Binter.

10. Bhakti TNI Dilihat dari Aspek Ruang Juang. Ruang juang merupakan perwujudan dari hasil pembinaan potensi geografi yang meliputi bidang sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan segenap potensi sumber kekayaan alam dibina menjadi kekuatan geografi dalam wujud ruang juang yang tangguh dan memiliki daya tangkal kewilayahan untuk kepentingan pertahanan. Kegiatan Bhakti TNI yang selama ini diprogramkan dan dilaksanakan berkaitan dengan kepentingan ruang juang yang tangguh antara lain:

- a. Hampir semua Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) membuat program memperbaiki jalan, membuka jalan baru, membuat atau memperbaiki jembatan dan sarana lainnya guna mentransformasikan pembangunan yang ada untuk mewadahi kepentingan pertahanan khususnya aplikasi sebagai jalan pendekat.
- b. Beberapa Satgas membangun bak penampungan air, pembuatan sumur dan pemasangan pipa air minum sesuai kebutuhan daerah guna mewadahi untuk kepentingan sumber logistik wilayah.

c. Daerah pantai yang masyarakatnya adalah nelayan, Program TMMD diarahkan untuk merehabilitasi dermaga, mengadakan pembangkit listrik skala kecil untuk mewadahi bagi kepentingan cadangan materiil strategis apabila dipelihara dan ditingkatkan pembangunannya.

d. Penyelenggaraan Bhakti TNI yang bermasalah terjadi di Kodim Tapanuli Tengah, yaitu penyelenggaraan TMMD ke 82 tahun 2008, permasalahan tersebut terletak pada sasaran yang dialihkan, sehingga pelaksanaan Bhakti TNI di daerah tersebut tertunda selama 2 (dua) bulan¹⁴. Permasalahan lain yang menonjol adalah penyelenggaraan Bhakti TNI di Kodim Tanah Datar pada saat penyelenggaraan TMMD ke 83 tahun 2009, permasalahan tersebut adalah masyarakat meminta ganti rugi karena lahan pertanian rakyat digunakan untuk pembangunan jalan¹⁵.

11. Bhakti TNI Dilihat dari Aspek Alat Juang. Alat juang merupakan perwujudan dari hasil pembinaan potensi demografi yang dibina menjadi kekuatan demografi dalam wujud alat juang yang tangguh dan memiliki daya tangkal kewilayahan untuk

¹⁴ Laporan PJO tentang pelaksanaan TMMD ke 83 tahun 2009 hal. 20

¹⁵ Ibid hal. 15

kepentingan pertahanan negara. Pembinaan terhadap potensi ini untuk kepentingan rakyat yang tergabung dalam komponen cadangan dan komponen pendukung yang pengabdianya disesuaikan dengan profesi.

Kegiatan Bhakti TNI yang selama ini diprogramkan dan dilaksanakan dikaitkan dengan kepentingan alat juang yang tangguh melalui kegiatan fisik dan non fisik antara lain:

- a. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penyuluhan maupun ceramah-ceramah dengan materi bela negara seperti :
 - 1) Kesadaran bela negara.
 - 2) Wawasan kebangsaan.
 - 3) Cinta tanah air.
- b. Bekerja sama dengan instansi terkait yang terlibat dengan kegiatan pelatihan.

Upaya yang dilakukan dalam penentuan program Bhakti TNI khususnya untuk mewujudkan alat juang yang tangguh dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penyuluhan dan ceramah dengan materi bela negara seperti

kesadaran bela negara, wawasan kebangsaan, cinta tanah air agar masyarakat memiliki rasa kebangsaan yang tinggi dan memberikan pelatihan kesiapsiagaan dengan muatan pelatihan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dan pelatihan lapor cepat dan temu cepat dalam upaya untuk menyiapkan masyarakat yang tanggap terhadap situasi wilayah.

Pembinaan untuk menyiapkan masyarakat yang mau secara sukarela dan sadar untuk ikut serta dalam bela negara dan menyiapkan masyarakat yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan dilakukan dengan metoda penyuluhan dan ceramah serta praktek lapangan. Kegiatan penyuluhan dan ceramah kepada masyarakat tentang kesadaran bela negara menggunakan metoda ceramah yang terkesan monoton dan bersifat indoktrinasi. Sedangkan untuk menyiapkan masyarakat agar mampu dan terampil namun terkendala oleh waktu yang tersedia, dan keberadaan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang sampai sekarang jumlahnya belum memenuhi kebutuhan apabila dibandingkan antara luas wilayah dengan jumlah personel yang bertugas di wilayah tersebut, sehingga dalam rangka Pembinaan Teritorial di wilayah, Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkwil) berupaya mengoptimalkan aparat yang ada dengan memberikan tugas kepada beberapa anggota Babinsa untuk merangkap tugas lebih dari satu desa binaan.

12. Bhakti TNI Dilihat dari aspek Kondisi Juang. Kondisi juang merupakan perwujudan dari hasil pembinaan potensi kondisi sosial menjadi kekuatan pertahanan, sehingga wilayah memiliki daya tangkal kewilayahan yang kuat dan mampu mendukung kepentingan pertahanan negara. Kegiatan Bhakti TNI yang selama ini diprogramkan dan dilaksanakan terkait dengan kepentingan untuk mewujudkan kondisi juang yang tangguh melalui kegiatan non fisik dirasakan kegiatan tersebut belum menunjukkan adanya kreasi dan inovasi yang dapat memberikan daya tarik bagi masyarakat dan terkesan membosankan¹⁶. Aspek kondisi juang tersebut merupakan aspek kondisi sosial masyarakat yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

a. **Bidang Ideologi.** Bhakti TNI yang diarahkan untuk pembinaan sosial masyarakat bidang ideologi dilaksanakan melalui kegiatan non fisik, antara lain:

- 1) Memberikan penyuluhan secara terpadu untuk menanamkan keyakinan masyarakat tentang pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara.

¹⁶Laporan PJO tentang pelaksanaan TMMMD ke 83 tahun 2009 hal. 19

2) Mewaspadaikan terhadap gerakan ekstrim dan radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan kegiatan eks G.30 S/PKI dan gerakan radikal lainnya. Sampai sekarang pihak TNI masih memperlakukan kelompok garis keturunan eks G 30 S /PKI sebagai bahaya laten.

3) Melakukan penyuluhan secara terpadu tentang bahaya laten Komunis, fundamentalis, teroris dan paham radikal lainnya.

b. **Bidang Politik.** Bhakti TNI yang diarahkan untuk pembinaan masyarakat dibidang politik dilaksanakan melalui kegiatan non fisik, antara lain:

1) Menggugah masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan ceramah tentang pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara.

2) Mendorong masyarakat agar selalu mematuhi ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

3) Mendorong masyarakat untuk selalu mengutamakan kepentingan umum, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

c. **Bidang Ekonomi.** Bhakti TNI yang diarahkan untuk pembinaan masyarakat dibidang ekonomi, dilakukan dengan kegiatan fisik dan non fisik, antara lain:

- 1) Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak bergaya hidup konsumtif.
- 2) Membantu pemerintah dalam meningkatkan intensifikasi perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan yang dilaksanakan secara terpadu dan pemberdayaan di sektor lainnya. Kita masih ingat dengan program penggarapan lahan tidur TNI AD dalam membantu krisis ekonomi pada tahun 1997/1998. Program ini cukup besar manfaatnya bagi masyarakat luas karena dilaksanakan secara serentak diseluruh jajaran TNI AD, namun program ini tidak berlanjut karena terjadi krisis multidimensial sehingga perhatian terpecah pada penanganan kekacauan diberbagai daerah.
- 3) Memberikan penyuluhan secara terpadu tentang perkoperasian dan usaha kecil menengah kepada masyarakat.

d. **Bidang Sosial Budaya.** Bhakti TNI yang diarahkan untuk pembinaan masyarakat di bidang sosial budaya, dengan kegiatan kegiatan antara lain:

- 1) Memberikan pemahaman tentang pentingnya toleransi dalam hidup beragama kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan ceramah .
- 2) Memberikan penyuluhan tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan kepada masyarakat.
- 3) Menggalakan kegiatan olahraga dan melakukan kegiatan olahraga bersama TNI dengan masyarakat.
- 4) Memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai bentuk kesenian, budaya dan adat istiadat di lingkungan masyarakat.

e. **Bidang Pertahanan Keamanan.** Bhakti TNI yang diarahkan untuk pembinaan masyarakat di bidang pertahanan keamanan, dengan kegiatan kegiatan antara lain:

- 1) Membudayakan wajib lapor kepada pihak keamanan, apabila ada perkembangan situasi yang terjadi dilingkungan masyarakat. Dalam kehidupan sehari hari masyarakat seolah pasif untuk melaporkan hal hal yang menonjol karena

mereka beranggapan sudah ada aparat keamanan dilingkungannya.

2) Mendorong kepada masyarakat untuk mengikuti penataran bela negara yang telah diprogramkan oleh pemerintah melalui jalur lingkungan pendidikan, pemukiman dan pekerja, yang kenyataannya untuk pemberian pembekalan kepada lingkungan pemukiman belum tersentuh secara menyeluruh.

3) Menggalakkan kegiatan Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di lingkungan masyarakat secara swakarsa, saat ini banyak desa yang menggunakan jasa satuan pengamanan, sehingga belum adanya rasa tanggung jawab sebagai warga terhadap keamanan daerahnya sendiri.

13. Bhakti TNI Dilihat dari Aspek Kemanunggalan TNI-Rakyat. Kemanunggalan TNI Rakyat merupakan perwujudan dari hasil pembinaan potensi masyarakat menjadi kekuatan yang tangguh berupa ikatan yang kokoh dan kuat serta bersatu padunya TNI-Rakyat baik secara fisik maupun non fisik. Kegiatan Bhakti TNI yang selama ini diprogramkan dan dilaksanakan dikaitkan dengan kepentingan untuk mewujudkan Kemanunggalan TNI-Rakyat dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

- a. Melakukan kegiatan bhakti sosial.
 - 1) Pemberian bantuan kemanusiaan
 - 2) Pengobatan massal
- b. Melakukan kegiatan bersama masyarakat, diantaranya:
 - 1) Melaksanakan silaturahmi melalui anjangsana kepada seluruh komponen masyarakat.
 - 2) Melaksanakan olahraga bersama.
 - 3) Melaksanakan kegiatan keagamaan.
 - 4) Melaksanakan kegiatan kesenian.
 - 5) Mengikuti acara adat dan lain-lain baik secara perorangan maupun dalam hubungan satuan.

Penyelenggaraan operasi bhakti yang terdiri dari 9 macam Bhakti TNI memang dilaksanakan untuk membantu kesulitan masyarakat diantaranya kegiatan TMMD, Manunggal Pemberantasan Buta Huruf, Manunggal KB Kesehatan, Manunggal Sosial Sejahtera dan lain-lain, pelaksanaan di lapangan ternyata partisipasi masyarakat di beberapa daerah masih perlu ditingkatkan.

BAB IV **ANALISA**

14. Umum. Bhakti TNI sebagai salah satu metode Binter untuk mewujudkan sasaran kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan perlu dikaji untuk mendapatkan suatu pemahaman apakah pelaksanaan metode tersebut sudah efektif dan bermanfaat bagi kepentingan penyiapan Ruang, Alat dan Kondisi juang yang tangguh. Analisa untuk mengetahui efektifitas penggunaan metode Bhakti TNI selama ini akan ditinjau melalui kajian terhadap implementasi Bhakti TNI dalam mewujudkan Ruang, Alat dan Kondisi juang yang tangguh sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai standar sasaran Binter.

15. Implementasi Bhakti TNI Dihadapkan dengan Wujud Ruang Juang yang Tangguh. Sesuai Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pada pasal 8 d, salah satu tugas TNI AD adalah membantu pemerintah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat untuk menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya untuk melaksanakan kepentingan

pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Langkah awal kegiatan yang harus dilakukan untuk mendukung penyiapan wilayah pertahanan adalah melakukan penataan ruang pertahanan di darat, meskipun legalitas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pertahanan, belum disahkan oleh pemerintah dan DPR walaupun legalitas RUTR belum dapat pengesahan dari pihak yang berwenang, namun demikian diharapkan Satkowil mulai dari Kodam sampai Kodim harus pro aktif mensosialisasikan Tata Ruang Wilayah pertahanan darat sesuai dengan tanggung jawabnya. Melalui kegiatan sosialisasi yang intensif diharapkan timbul kesepahaman antara TNI dengan Pemda dalam mengakomodasi Rencana Tata Ruang Wilayah pertahanan didarat guna mewujudkan Ruang juang yang tangguh dan sekaligus untuk melengkapi Tata Ruang Wilayah yang dibangun dan dirancang untuk mewadahi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Penjelasan dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 pasal 17 ayat 7 tentang penataan ruang, disampaikan bahwa "Rencana tata ruang untuk fungsi pertahanan dan keamanan karena sifatnya yang khusus memerlukan pengaturan tersendiri, sifat khusus tersebut terkait dengan adanya kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan sebagian informasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan

negara”. Rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai sub sistem rencana tata ruang kawasan pertahanan dan keamanan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya keseluruhan penataan ruang wilayah yang artinya bahwa penataan ruang wilayah pertahanan darat merupakan bagian dari RTRW nasional, provinsi dan kabupaten/daerah. Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kawasan strategis, kawasan budi daya, kawasan lindung atau kawasan lainnya harus mewedahi kepentingan pertahanan.

TNI AD menggelar unsur unsurnya dalam bala pertahanan wilayah (Balahanwil) dan bala pertahanan pusat (Balahanpus). Kodam sebagai Balahanwil dirancang selaku kompartemen strategis yang mempunyai kemampuan untuk memberikan pertahanan dan perlawanan secara mandiri dan berlanjut serta mampu dalam menyelenggarakan pertahanan dalam bentuk operasi angkatan tunggal maupun operasi gabungan secara semesta di pulau pulau besar dan rangkaian pulau kecil dalam daerah tanggung jawabnya. Penyelenggaraan pertahanan wilayah dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pertahanan darat yang disusun berdasarkan kemungkinan ancaman, sehingga dalam konsep

pertahanan perlu dipersiapkan wilayah pertahanan yang meliputi daerah pertempuran, daerah komunikasi, daerah belakang dan daerah yang dapat dijadikan sebagai daerah tumpuan dilancarkannya operasi perlawanan wilayah yang dikenal dengan daerah pangkal perlawanan untuk mendukung strategi pertahanan darat. Pemilihan daerah pangkal perlawanan harus berorientasi kepada :

- a. Daerahnya cukup aman dan mudah untuk mengorganisir pasukan/kekuatan perlawanan.
- b. Medannya menguntungkan bagi pasukan sendiri ditinjau dari segi lindung tembak dan lindung tinjau.
- c. Terdapat jalan jalan pendekat yang mutlak dikuasai oleh pihak pasukan kita.
- d. Terdapat sumber sumber kehidupan dan merupakan daerah sentra ekonomi

Implementasi metode Bhakti TNI untuk menyiapkan daerah pangkal perlawanan dalam rangka mewujudkan ruang juang yang tangguh kegiatannya mengarah kepada kegiatan fisik berupa pembangunan jalan, jembatan rehab/membangun prasarana ibadah, pembuatan balai desa, pembuatan sumur dan lainnya.

Apabila ditinjau dari pencapaian tujuan pembangunan maka pembukaan jalan dan jembatan telah memberikan nilai tambah terhadap perluasan tata ruang khususnya jaring jalan, dan pembukaan jalan juga telah membuka jalur darat yang menghubungkan antar desa, disisi lain pembukaan jalan dapat mempercepat proses pemekaran wilayah sesuai dengan tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Apabila kita cermati secara seksama, dapat kita pahami bahwa implementasi metode Bhakti TNI yang sudah berjalan selama ini tentunya akan lebih banyak berorientasi untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, meskipun kepentingan pertahanan juga sudah terakomodir secara tidak langsung, karena kegiatan-kegiatan fisik yang dilaksanakan pada dasarnya juga memberikan manfaat untuk kepentingan taktis militer. TNI dapat memanfaatkan infra struktur yang dibangun untuk kepentingan jalan pendekat dalam pengerahan pasukan dan untuk kepentingan evakuasi pasukan ke daerah yang sudah disiapkan serta untuk kepentingan jalur logistik. Dewasa ini program Bhakti TNI diarahkan untuk penanaman sejuta pohon trembesi yang bermanfaat untuk penghijauan, penangkal tanah longsor, banjir dan dalam kondisi tertentu sangat berguna bagi

kepentingan lindung tinjau, lindung tembak untuk kepentingan taktis militer.

Program Bhakti TNI yang selama ini diarahkan pada kegiatan fisik dirasakan sudah berjalan dan memenuhi tujuan pembangunan serta telah mengakomodir kepentingan pertahanan, namun dalam pelaksanaan di lapangan ternyata masih terjadi permasalahan teknis meski sudah dapat diatasi, seperti halnya masalah pengalihan sasaran TMMD yang terjadi di Kodim Tapanuli Tengah dalam penyelenggaraan TMMD ke 82 tahun 2008. Permasalahan tersebut memberikan kesan belum terpadunya penentuan sasaran antara pihak Kowil dengan Pemerintah Daerah sehingga terjadi pengalihan sasarannya yang mengakibatkan pelaksanaan Bhakti TNI di daerah tersebut tertunda selama 2 (dua) bulan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dibuat kurang terkoordinasi dengan baik sehingga berdampak terhadap hasil yang dicapai kurang maksimal apabila ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas pekerjaan serta nilai guna proyek apabila ditinjau dari segi pemenuhan kriteria sebagai upaya membuka daerah terisolir atau daerah tertinggal. Kejadian tersebut apabila ditinjau dari sudut pandang kepentingan pertahanan tentunya relatif tidak berpengaruh karena sasaran kegiatan fisik yang dikerjakan pasti akan menunjang untuk

kepentingan pertahanan minimal terwujudnya jalan-jalan pendekat bagi kepentingan pergerakan pasukan maupun kekuatan perlawanan rakyat. Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan Bhakti TNI di Kodim Tanah Datar pada saat penyelenggaraan TMMD ke 83 tahun 2009 yang berkaitan dengan ganti rugi atas kerusakan tanaman masyarakat yang berada di daerah kegiatan Bhakti TNI dengan sasaran pembuatan jalan. Masalah ini muncul dikarenakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan jalan dalam kegiatan Bhakti TNI belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengerti tujuan kegiatan Bhakti TNI, sehingga timbul persepsi masyarakat bahwa kegiatan Bhakti TNI sama dengan proyek pada umumnya. Kasus seperti ini merupakan akibat kurang sinkronnya antara RTRW pertahanan dan RTRW wilayah, sementara perencanaan tersebut telah digunakan sebagai dasar pemikiran dalam pembuatan pedoman sementara tentang penyusunan tata ruang wilayah pertahanan.

Dalam upaya menjadikan aspek geografi dengan segala potensinya yang ada, baik sumber daya alam, sumber daya buatan dan kekayaan alam yang ada untuk dijadikan sebagai ruang juang yang tangguh tidak dapat serta merta terwujud, karena kegiatan

Bhakti TNI khususnya operasi Bhakti sifatnya temporer dalam kurun waktu yang relatif pendek, meskipun penyempurnaannya dapat ditindak lanjuti dengan program karya Bhakti oleh Satkowil. Pada dasarnya penyelenggaraan operasi Bhakti TNI dilaksanakan setiap tahun oleh Kowil baik sebagai kegiatan reguler maupun sebagai kegiatan imbang, sedangkan karya Bhakti dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan, dalam arti dapat dilaksanakan sewaktu waktu dengan melihat situasi wilayah dan dana yang ada di satuan.

Kenapa sasaran kegiatan fisik Bhakti TNI diprogramkan kurang memberikan hasil langsung terhadap kepentingan pertahanan dan sampai tingkat manakah ruang juang yang tangguh sudah terwujud ? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut perlu ditinjau kembali manajemen kegiatan Bhakti TNI yang diawali dari proses perencanaan sampai pelaksanaan Bhakti TNI diawali dari rencana penentuan sasaran, khususnya untuk aspek ruang juang untuk kepentingan pertahanan. Proses penentuan sasaran diawali dari usulan satuan bawah mulai dari Babinsa kepada Danramil dan dikoordinasikan oleh Kasdim selaku anggota tetap forum Rakorbangda pada umumnya para Kasdim dalam rapat Bangda kurang gigih memperjuangkan sasaran kegiatan yang terkait dengan

kepentingan pertahanan, bahkan masih terdapat Kasdim yang belum mengetahui bagaimana menentukan sasaran kegiatan untuk kepentingan pertahanan, sehingga dalam Rakorbangda tersebut sering kali menghasilkan keputusan penentuan sasaran yang berorientasi pada kepentingan kesejahteraan masyarakat, meskipun kepentingan pertahanan untuk mewujudkan ruang yang tangguh juga sudah terakomodir.

Untuk mengetahui sampai tingkat mana aspek ruang juang yang tangguh sudah terwujud perlu kita lihat sasaran Binter dalam mewujudkan ruang juang sebagai parameter keberhasilan. Kodam selaku kompartemen strategis yang memiliki beraneka ragam bentuk, sifat, geografi, demografi dan kondisi sosial di wilayahnya memerlukan metode pembinaan dan penyiapan potensi yang berbeda, sehingga tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Binter belum dapat diukur keberhasilannya baik secara kualitas maupun kuantitas. Agar penyiapan ruang juang yang tangguh dapat segera terwujud untuk memenuhi tersedianya wilayah pertahanan aspek darat yang siap digunakan sebagai mandala operasi atau untuk mendukung kesiapan operasi satuan sendiri, maka perlu pemrograman dan pengalokasian oleh TNI tanpa bersandar kepada Penda atau instansi lainnya.

16. Implementasi Bhakti TNI Dihadapkan dengan Wujud Alat Juang yang Tangguh. Sasaran Binter untuk mewujudkan alat juang yang tangguh berupa tersedianya komponen cadangan dan komponen pendukung yang sudah terorganisir secara nyata dengan segenap perangkatnya yang siap digunakan untuk kekuatan pengganda dalam memenangkan pertempuran bila terjadi perang. Apakah sasaran Binter dalam membentuk alat juang yang tangguh sudah dapat diwujudkan? Kita tahu bahwa sampai sekarang RUU komponen cadangan baru masuk prolegnas legislatif, sementara itu RUU komponen pendukung sampai sekarang belum ada tanda tanda pembuatannya, meskipun sudah diyakini bahwa undang-undang komponen cadangan dan komponen pendukung akan segera diberlakukan mengingat amanat UUD 1945 tentang bela negara yang memberikan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam bela negara melalui komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung yang ditafsirkan sebagai wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara. Disamping itu kewajiban bela negara telah didasari oleh perkembangan sistem pertahanan yang mengacu prinsip demokrasi, hak azasi manusia, kesejahteraan umum, prinsip hidup berdampingan secara damai, prinsip hukum nasional, ketentuan

hukum dan kebiasaan internasional, sehingga Undang-Undang tentang komponen cadangan dan komponen pendukung dapat dibentuk. Mengacu kepada belum terbentuknya undang-undang komponen cadangan dan komponen pendukung maka kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada upaya menyediakan komponen cadangan dan komponen pendukung seharusnya tidak dilakukan, karena TNI tidak dapat bertindak tanpa adanya legalitasnya undang-undang yang dapat dipakai sebagai payung hukum.

Konsep pengembangan aspek demografi yang diarahkan untuk mewujudkan alat juang yang tangguh, melaksanakan kegiatan menyiapkan masyarakat sebagai berikut :

- a. Masyarakat disiapkan sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung dalam sistem pertahanan semesta.
- b. Masyarakat dapat melaksanakan fungsi pengamanan, deteksi dini, terhadap masuknya pihak lawan yang akan melakukan infiltrasi.
- c. Masyarakat mempunyai kerelaan berkorban untuk negara dengan kesadaran, keiklasan dan tanggung jawab dalam ikut mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

d. Berupaya mengembangkan kualitas penduduk yang merupakan suatu kekuatan yang harus dibina secara terus menerus sehingga mampu melaksanakan fungsi perlawanan rakyat secara berdaya dan berhasil guna.

Pembinaan sumber daya manusia yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan kesadaran bela negara yang tangguh dan memiliki kemampuan fisik berupa ketrampilan bela negara dilakukan melalui Penataran Pendidikan Bela Negara yang diprogramkan oleh pemerintah melalui 3 (tiga) jalur lingkungan yaitu:

- 1) Jalur lingkungan pendidikan.
- 2) Jalur lingkungan pemukiman.
- 3) Jalur lingkungan pekerja.

Selama ini pelaksanaan penataran bela negara dalam jalur lingkungan pendidikan dan jalur lingkungan pekerja sudah terealisasi dengan baik karena materi materi tersebut masuk dalam kurikulum pendidikan, begitu pula untuk lingkungan pekerja dapat diatur sesuai dengan kegiatan yang direncanakan dalam kegiatan mingguan oleh instansinya.

Kendala yang dihadapi dalam memberikan penataran pada jalur di lingkungan pemukiman adalah keberadaan warga masyarakat yang tersebar dan mempunyai kepentingan sehari-hari yang berbeda-beda, sehingga mengakibatkan sulitnya dalam memberikan penataran. Seyogyanya untuk pemberian penataran belanegara di lingkungan pemukiman dilakukan secara bertahap sehingga dengan waktu yang dibutuhkan relatif panjang tapi tujuan pemberian materi kepada warga dapat tercapai secara menyeluruh.

Pembinaan yang selama ini dilaksanakan khususnya berkaitan dengan materi kesadaran belanegara, rasa cinta terhadap tanah air Indonesia, penanaman nilai wawasan kebangsaan, cara penyampaianya di lingkungan pemukiman dalam kegiatan Bhakti TNI menggunakan metode indoktrinasi yang dirasakan kurang aplikatif dan memberikan kesan monoton serta membosankan, sehingga sulit diterima oleh masyarakat karena pernyataan pernyataannya bersifat abstrak yang sulit untuk dibayangkan. Metode ceramah yang selama ini digunakan sebagai alat untuk menyampaikan materi bela negara kiranya perlu untuk dipertimbangkan kembali, agar masyarakat mudah untuk menerimanya, karena materi yang berkaitan dengan kesadaran moral, menumbuhkan rasa kecintaan terhadap negara Kesatuan

Republik Indonesia serta pemahaman tentang wawasan kebangsaan harus disampaikan secara nyata. Metoda mengajak, diskusi serta pengenalan secara fisik terhadap simbol-simbol kebangsaan merupakan metode yang lebih tepat digunakan dibandingkan dengan metode ceramah, karena metode tersebut akan mempercepat proses pemahaman masyarakat terhadap kesadaran belanegara, seperti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengikuti upacara bendera dan mengibarkan bendera merah putih pada hari Nasional. Kenyataan sekarang ini masih ada masyarakat yang belum mengerti apalagi memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, meskipun daerah tersebut sudah pernah dijadikan sebagai sasaran kegiatan Bhakti TNI, apalagi daerah-daerah yang belum terjamah oleh kegiatan Bhakti TNI. Seyogyanya untuk pemberian penataran bela negara dilingkungan pemukiman dilakukan secara bertahap walaupun dengan waktu yang relatif panjang namun tujuan pemberian materi bela negara kepada warga dapat tercapai secara menyeluruh.

Apabila kita melihat fakta dilapangan, tentang kegiatan aparat Kowil dipedesaan yang berupaya untuk menyiapkan masyarakat agar mempunyai kemampuan dan ketrampilan bela negara sesuai dengan konsep pengembangan aspek demografi untuk dijadikan

sebagai alat juang yang tangguh, dapat kita simpulkan bahwa pembinaannya selama ini belum dapat dijalankan secara kontinu, karena proses pembinaan membutuhkan waktu relatif panjang dan membutuhkan perencanaan dan kesiapan yang matang, sebab untuk mendapatkan suatu kemampuan dan keterampilan dibutuhkan latihan yang bertahap, bertingkat dan berlanjut dibandingkan dengan program Bhakti TNI yang kegiatannya hanya bersifat temporer dengan waktu terbatas selama 3 (tiga) minggu dan bahkan waktu 3 (tiga) minggu tidak sepenuhnya efektif untuk digunakan membina masyarakat secara aktif dilapangan maka sudah dapat disimpulkan bahwa dengan kegiatan Bhakti TNI tersebut pencapaian sasaran mewujudkan alat juang belum dapat tercapai secara optimal. Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah keberadaan para Babinsa kekuatan nyata Babinsa hampir diseluruh Satkowil belum dapat memenuhi kebutuhan pembinaan teritorial banyak desa yang tidak mempunyai Babinsa, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan tersebut terpaksa diambil langkah dengan cara mengoptimalkan Babinsa dengan memberi tugas rangkap sehingga membawahi lebih dari satu desa.

Kenyataan seperti ini mengindikasikan bahwa pembinaan teritorial yang dilakukan Satkowil untuk menyiapkan masyarakat agar memiliki kesadaran bela negara dan mempunyai kemampuan tertentu dalam menghadapi perang semesta, belum dapat direalisasikan secara optimal. Untuk mengetahui sampai tingkat mana aspek alat juang yang tangguh sudah terwujud? parameter keberhasilan terwujudnya aspek alat juang yang tangguh adalah tersedianya komponen cadangan dan komponen pendukung yang sudah terorganisir secara nyata untuk digunakan sebagai kekuatan pengganti, sedangkan sampai sekarang RUU komponen cadangan dan komponen pendukung belum diberlakukan, sehingga belum dapat diketahui wujud ketangguhan aspek alat juang yang diharapkan.

17. Implementasi Bhakti TNI Dihadapkan dengan Wujud Kondisi Juang yang Tangguh. Kondisi juang yang tangguh berupa kondisi dinamis masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Pembinaan bidang perlawanan wilayah dalam fungsi Binter

dilaksanakan dengan menyelenggarakan segala upaya, pekerjaan dan kegiatan penyusunan tata ruang wilayah pertahanan, pembinaan sumber daya alam dan buatan, sumber daya manusia dan kondisi sosial bagi kepentingan pertahanan negara. Pembinaan kondisi sosial harus terkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dan dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan serta kesepakatan dengan arah kebijakan dan implementasi sebagai berikut:

- a. **Aspek Ideologi.** Diarahkan untuk membantu pemerintah secara terbatas dalam meningkatkan motivasi seluruh masyarakat agar dalam berbangsa dan bernegara tetap berdasarkan falsafah Pancasila. Oleh sebab itu implementasi pelaksanaan kegiatan Bhakti TNI khususnya dalam kegiatan non fisik, disamping memberikan penyuluhan secara terpadu bagaimana hidup berbangsa dan bernegara dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila juga mengajak masyarakat melakukan pemantauan terhadap perkembangan kegiatan eks G.30 S/PKI, serta melakukan penyuluhan secara terpadu tentang bahaya latent komunis, fundamentalis, teroris dan faham radikal lainnya.

Kegiatan pemantauan ini sebenarnya sudah tidak sesuai dengan realitas yang ada saat ini, karena keterkaitan G30 S/PKI dengan masa sekarang sudah tidak ada relevansinya, oknum yang melakukan gerakan makar tersebut hampir sudah tidak ada lagi dimuka bumi pertiwi ini, seandainya pelaku makar G 30 S/PKI masih ada, maka eksistensinya sudah tidak berpengaruh terhadap kedaulatan negara Indonesia. Hal ini dilakukan dalam upaya agar paham komunis tidak dapat mengembangkan eksistensinya. Perlakuan TNI terhadap warga negara Indonesia yang mempunyai garis keturunan eks G 30 S/PKI, kelompok radikal lainnya sampai sekarang belum memberi toleransi untuk menjadi keluarga besar TNI, sehingga memungkinkan timbulnya rasa empati sebagian masyarakat terhadap kebijakan TNI, namun demikian hal ini merupakan suatu tindakan yang tegas untuk dipakai sebagai penangkal terhadap kemungkinan timbulnya kegiatan serupa yang telah menodai catatan sejarah bangsa Indonesia

b. **Aspek Politik.** Diarahkan untuk membantu pemerintah secara terbatas dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk tetap dan selalu memiliki partisipasi politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara agar selalu mematuhi ketentuan hukum dan mengajak masyarakat agar selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan pribadi maupun golongan dilaksanakan secara terpadu. Kenyataan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, banyak masyarakat yang berorientasi untuk kepentingan pribadinya, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sebagai contoh proses pemilihan pejabat daerah, dimana masyarakat masih mudah dipengaruhi oleh hasutan-hasutan dengan imbalan tertentu demi tercapainya kepentingan kelompok.

c. **Aspek Ekonomi.** Dalam aspek ekonomi, arah kebijakannya adalah untuk membantu pemerintah secara terbatas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemampuan dukungan masyarakat dalam mewujudkan kemampuan logistik wilayah yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kegiatan Bhakti TNI untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan intensifikasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta meningkatkan kemampuan usaha kecil agar dapat membantu

masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pertanyaan yang perlu untuk dijawab adalah bagaimana memposisikan TNI dalam mengambil porsi yang tepat dalam melaksanakan program Bhakti TNI dihadapkan dengan kelembagaan yang lain?. Pada era reformasi sekarang ini program Bhakti TNI seperti penggarapan lahan tidur mulai dipertanyakan relevansinya dengan tugas pokok TNI, karena dalam reformasi internal TNI diamanatkan agar TNI lebih profesional dibidang pertahanan artinya kegiatan yang berorientasi pada peningkatan intensitas dan kualitas kemiliteran harus menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kegiatan lainnya.

d. **Aspek Sosial Budaya.** Arah kebijakan yang menyatakan bahwa kegiatan harus diarahkan untuk membantu secara terbatas dalam meningkatkan kehidupan masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang cerdas, taat hukum, sehat dan bermoral serta mencintai budaya dalam kemajemukan bangsa. Dalam kegiatan non fisik Bhakti TNI bersama instansi terkait memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi hidup beragama dan melarang mengikuti ajaran diluar ketentuan agama yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak memberikan peluang bagi

ajaran yang menyesatkan dan menimbulkan permasalahan dikalangan masyarakat itu sendiri. Melakukan kegiatan penyuluhan tentang kebersihan dan kesehatan yang dikoordinasikan dengan dinas kesehatan dan menumbuh kembangkan berbagai bentuk kesenian, budaya dan adat istiadat dengan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar serta membantu masyarakat agar bisa membaca bagi yang masih buta aksara. Dengan kegiatan Bhakti TNI yang bernuansa sosial dan kemanusiaan, diharapkan akan tumbuh ketahanan dalam wujud kondisi juang yang tangguh, sehingga memiliki daya tangkal kewilayahan yang kuat dan mampu mendukung kepentingan pertahanan. Perlu untuk disadari bahwa keterlibatan TNI dalam memberikan penyuluhan, menumbuh kembangkan budaya dan adat istiadat serta kegiatan lainnya merupakan kegiatan yang bersifat membantu dan mendorong, bukan sebagai leading sektor, karena bidang tersebut merupakan bidang tanggung jawab institusi lain.

e. **Aspek Pertahanan dan Keamanan.** Kebijakan dalam aspek pertahanan dan keamanan diarahkan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan serta keterampilan masyarakat dalam upaya bela negara,

sehingga dapat menangkal berbagai hakekat ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa. Adapun kegiatan yang diprogramkan dalam kegiatan Bhakti TNI dengan membudayakan wajib lapor setiap ada perkembangan situasi yang terjadi dilingkungan masyarakat, namun kenyataan yang ada masyarakat masih bersifat pasif apabila melihat atau mendengar hal hal yang menonjol dan tidak lazim terjadi dilingkungannya, karena masyarakat bergantung kepada aparat yang bertugas di daerahnya. Berkaitan dengan kegiatan poskamling dilingkungan masyarakat ternyata masih banyak masyarakat yang belum memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga untuk ikut memberikan rasa aman di daerahnya, hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan terhadap warga untuk menggalakkan kegiatan poskamling belum dapat diterima secara utuh.

Dari analisa kondisi sosial masyarakat yang terdiri dari beberapa aspek tersebut dihadapkan dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi dinamis masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ternyata hasilnya belum dapat dinyatakan baik

secara kualitas maupun kuantitas karena parameter keberhasilannya bersifat abstrak.

18. Implementasi Bhakti TNI Dihadapkan dengan Wujud Kemanunggalan TNI-Rakyat. Kemanunggalan TNI-Rakyat merupakan suatu keadaan sikap perilaku yang menyatu antara TNI dengan rakyat, baik secara lahir maupun batin dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Kegiatan kegiatan fisik dan non fisik dalam Bhakti TNI memang menunjukkan adanya variasi yang tinggi dalam pemilihan obyek yang sasarannya dilaksanakan melalui Manunggal Kesejahteraan, Manunggal KB kesehatan, Manunggal Buta Aksara, Manunggal lainnya dan kegiatan pengobatan massal sebagai kegiatan Bhakti sosial untuk bantuan kemanusiaan dalam upaya membantu kesulitan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah tertentu. Memang dengan beragam macamnya Bhakti TNI dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan dapat dipakai sebagai sarana untuk meningkatkan kemanunggalan TNI-Rakyat dengan kegiatan-kegiatan yang berorientasi kebersamaan dengan rakyat. Memang program kegiatan Bhakti TNI selain kegiatan bersifat fisik dengan harapan sasarannya dapat dikerjakan secara gotong royong dengan masyarakat setempat juga kegiatan non fisik

sebagai kegiatan untuk menyelesaikan tugas sesuai dalam program yang dapat dipakai sebagai sarana untuk silaturahmi dengan masyarakat yang pada akhirnya dapat untuk meningkatkan kemanunggalan TNI- Rakyat.

Penyelenggaraan Bhakti TNI yang ternyata dilaksanakan hasil pencapaian sasaran kegiatannya lebih dominan pada kepentingan kesejahteraan masyarakat dan tidak banyak memberikan kontribusi terhadap kepentingan pertahanan khususnya dalam upaya meningkatkan kemanunggalan TNI-Rakyat.

Adapun kelemahan-kelemahan program Bhakti TNI apabila dihadapkan dengan upaya untuk mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat diantaranya adalah pertama, program tersebut belum tentu memberikan dampak terhadap kepentingan pertahanan khususnya berkaitan dengan kepentingan taktis, kelemahan kedua program program tersebut belum mampu menggerakkan masyarakat secara sukarela untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Bhakti TNI, hal ini terjadi karena mungkin sebagian masyarakat ada yang merasa kalau program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan keinginannya meskipun sudah melalui mekanisme bottom up planning dalam forum Rakorbang mulai dari tingkat desa sampai tingkat

kabupaten/kota dan kemungkinan karena waktu kegiatan Bhakti TNI berbenturan dengan waktu untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Kegiatan Bhakti TNI di beberapa daerah tidak tersosialisasikan secara utuh, sehingga kegiatan di beberapa daerah terkesan menjadi TNI centris dan kurangnya partisipasi masyarakat, sementara program operasi Bhakti waktunya terbatas dan tidak ada program lanjutan mengakibatkan komunikasi dan kebersamaan TNI-Rakyat belum terwujud.

BAB V

PENUTUP

19. **Kesimpulan.** Dari seluruh uraian mulai dari bab pendahuluan sampai pada bab penganalisaan dapat ditarik beberapa kesimpulan menyangkut pembahasan implementasi Bhakti TNI dalam rangka mewujudkan sasaran Binter. Pembahasan terhadap persoalan persoalan tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi Bhakti TNI dalam rangka mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh serta terciptanya kemanunggalan TNI-Rakyat, serta bagaimana alternatif implementasi Bhakti TNI dimasa yang akan datang. Secara umum hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Implementasi Bhakti TNI dalam rangka mewujudkan ruang juang yang tangguh dengan kegiatan yang bersifat fisik telah memberikan kontribusi terhadap kepentingan pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Pemilihan sasaran yang kurang memberikan dampak signifikan terhadap kepentingan pertahanan negara seharusnya tidak menjadi prioritas TNI. Membangun atau merehabilitasi jalan, jembatan sangat terkait dengan

kepentingan taktis karena dapat digunakan sebagai jalan jalan pendekat bagi operasi militer, sedangkan membangun atau merehabilitasi tempat ibadah, gapura dan rumah masyarakat dan pembuatan MCK tidak memberikan keuntungan taktis bagi operasi militer. Penentuan sasaran Bhakti TNI sangat dipengaruhi oleh proses penentuan sasaran yang diajukan melalui bottom up planning. Dalam proses ini Satkowil belum bisa memperjuangkan sasaran secara maksimal, karena pendanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah sehingga pihak Pemda benar-benar memperjuangkan sasaran Bhakti TNI untuk kepentingan kesejahteraan.

b. Penyelenggaraan penyediaan komponen cadangan dan komponen pendukung masih menunggu legislasi undang-undang, sedangkan tersedianya masyarakat yang mempunyai tanggung jawab dalam ikut mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara sesuai dalam konsep pengembangan aspek demografi untuk diarahkan menjadi alat juang yang tangguh dengan tersedianya komponen cadangan dan komponen pendukung yang sudah terorganisir secara nyata dengan segenap perangkatnya, proses penyediaannya membutuhkan waktu yang panjang dan berkesinambungan.

Mengingat penyelenggaraan Bhakti TNI waktunya terbatas dengan jumlah aparat Kowil yang minim, maka pencapaian wujud alat juang yang tangguh belum dapat optimal.

c. Untuk mewujudkan kondisi dinamis masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijabarkan dalam bidang Ipoleksosbudhankam belum mencapai sasaran secara optimal, karena perlu disadari bahwa pelibatan TNI dalam menangani beberapa bidang hanyalah bersifat membantu dan mendorong, bukan bertanggung jawab langsung atas keberhasilannya, kecuali bidang pertahanan keamanan. Reformasi internal TNI mengamanatkan agar TNI lebih profesional di bidang pertahanan, dengan meningkatkan intensitas dan kualitas latihan kemiliteran sebagai prioritas utama dibandingkan dengan kegiatan lainnya.

d. Kemanunggalan TNI-Rakyat belum terwujud secara penuh, karena pelaksanaan program kegiatan fisik dan non fisik belum mampu menggerakkan masyarakat secara ikhlas dan sadar untuk berpartisipasi, disamping program Bhakti TNI waktunya terbatas dan programnya tidak berkelanjutan sehingga komunikasi dan kebersamaan antara TNI-Rakyat hanya terbatas pada saat ada kegiatan.

20. **Rekomendasi.** Apabila TNI ingin memprioritaskan terhadap pencapaian terwujudnya sasaran Binter dalam rangka pertahanan negara dengan melihat analisa yang telah dijabarkan, maka ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan dalam tulisan ini :

- a. Diharapkan Dansatkovil tingkat Kodim dapat secara maksimal memperjuangkan sasaran Bhakti TNI agar lebih diprioritas pada kepentingan pertahanan, dan diharapkan TNI AD membuat program yang dikhususkan untuk menyiapkan wilayah sebagai ruang juang yang tangguh, guna mempercepat dan kemudahan untuk mewujudkan tercapainya sasaran Binter.
- b. Diharapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian pertahanan untuk segera mendesak pihak legislatif, agar rancangan undang-undang tentang komponen cadangan dan komponen pendukung segera disetujui dan dapat diberlakukan, sehingga dalam penyiapan alat juang ada legalitas yang dapat dipakai sebagai payung hukum, selain hal itu perlunya pemenuhan aparat Kowil khususnya Babinsa untuk melakukan pembinaan di pedesaan.

- c. Program Bhakti TNI diharapkan berorientasi pada kepentingan pertahanan.
- d. Program Bhakti TNI diharapkan dirancang melalui proses bertingkat dan berlanjut, sehingga wujud kemanunggalan TNI-Rakyat dapat terpelihara dan ditingkatkan dari masa ke masa.

Bandung, Maret 2011
Komandan Seskoad

Nanang Djuana Priadi
Mayor Jenderal TNI